

► KELAUTAN

Illegal Fishing Berlebihan

BANTUL—Kasus penangkapan ikan ilegal alias *illegal fishing* di Indonesia sudah berlebihan. Hal itu dikatakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), Achmad Poernomo, dalam seminar menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di UMY, Sabtu (25/4).

Poernomo mengatakan, hasil penelitian menunjukkan laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena menguasai sepertiga luas wilayah Indonesia. Hasil dari sumber daya laut itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian negara. Balitbang KP, misalnya, tahun ini akan melakukan kajian stok ikan nasional di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) laut Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan ikan dan mencegah aktivitas penangkapan ikan berlebih (*over fishing*).

Menurutnya, kajian tersebut dilakukan dengan anggaran sekitar Rp44,4 miliar. Sebagai informasi, beberapa perhitungan survei yang sudah dilakukan sebelumnya. Pada 2011 stok ikan Indonesia tercatat 6,520 juta ton, dan 2013 sebanyak 7,305 juta ton. Sesuai ketentuan dari jumlah itu hanya 80% yang bisa ditangkap. Namun sayangnya, lanjut dia, keamanan laut dan masalah penangkapan ikan secara ilegal masih marak terjadi.

"Indonesia sudah *over illegal fishing*, artinya banyak ikan yang diambil secara ilegal. Menurut laporan FAO 2014, 91,1 persen stok ikan di dunia sepenuhnya dieksploitasi. Dan masalah utama banyaknya hasil tangkapan ikan ilegal dan tidak teratur ini terjadi di perairan Indonesia, yakni perairan China Selatan dan Sulawesi," jelasnya.

Karena itu, jika penegakkan hukum terhadap *illegal fishing* tidak dilakukan maka sebagian besar biota kelautan Indonesia terus dijarah oleh kapal-kapal asing.

Dalam acara yang sama, Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan, jelang implementasi MEA, Indonesia belum mampu melakukan penetrasi pasar dengan baik. Salah satunya adalah mengubah kesukaan masyarakat akan produk-produk impor ke produk ekspor atau dalam negeri. (Abdul Hamied Razak)